

Kiat Antipikun Versi Kapusdokkes Polri



Filsafat Hidup

Kaget juga mendengar pernyataan **perbanyaklah berutang ketika akan memasuki pensiun**. Dengan banyak utang dipastikan akan memperlambat datangnya kepikunan. Pernyataan itu disampaikan Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri Brigjen Pol. dr. Arthur Tampi ketika awak bersilaturahmi kepada beliau.

Awak datang menyambangi orang nomor satu di jajaran Pusdokes Polri itu pada Kamis, 28 Februari 2013 di kantornya yang nyaman di Mabes Polri. Kedatangan awak tidak lain adalah ingin menyampaikan hadiah berupa dua buah buku. Buku tersebut bertajuk *Catatan Harian Seorang Purnawirawan Polri*. Kedatangan senior ke junior disambut ramah dan hangat.

Setelah menyimak dengan saksama, pernyataan soal utang di masa pensiun tersebut adalah sebuah ungkapan **filosof yang sangat dalam**. Memasuki masa pensiun adalah ibarat memasuki medan perang tanpa dibekali senjata. Makanya dahulu kala (ya di masa Orde Baru) ada masa satu tahun bagi calon pensiun untuk mengasah keterampilan. Periode itu dinamakan MPP (masa persiapan pensiun).

Selama setahun dengan gaji penuh + uang tunjangan tidak berkurang, si aparat diberi keuangan waktu tidak masuk kantor. Pegawai tersebut tidak masuk kantor yang lama, tetapi diarahkan masuk ke kantor lain yang terkait dengan keterampilan yang akan digelutinya ketika memasuki masa pensiun. Saat ini sistem MPP itu tampaknya tidak ada lagi atau memang tidak diminati. Dokter Arthur menjelaskan, otak (*brain*) seseorang ketika masuk masa pensiun **harus tetap tertantang** untuk menghadapi segala macam masalah.

Jangan sampai ketika pensiun otak menjadi tidak berfungsi maksimal. Kondisi seperti ini menyebabkan seseorang itu **mudah drop**. Apalagi apabila sang purna di hinggapi *post power syndrom* dan perasaan nelangsa merasa

diri tidak berguna lagi. Oleh karena itu, secara bercanda dr. Arthur mengatakan sebaiknya seorang itu banyak mempunyai utang sehingga si pensiunan tertantang untuk membayar utang. Tertantang membayar utang itulah yang akan membuat sang purna berpikir menggunakan akalnnya sehingga *brain* tetap berfungsi optimal.

Mesin Uang

Kami ngobrol santai, awak melaporkan bahwa kini kegiatan sang purnawirawan sejak 2,5 tahun pensiun adalah menulis dan mengajar serta silaturahmi. “Wah Pak Thamrin kelihatan seger,” dr. Arthur memuji awak. Hahahaha, biasa saja Dokter. Satu lagi **KIAT yang dianjurkan Kapusdokkes** ini untuk orang-orang yang akan memasuki pensiun adalah keharusan mempunyai mesin uang. Beliau mengatakan, “Berapa sih jumlah uang pensiun, mana cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.” Awak mengangguk 3 kali tanda setuju. Dana yang disimpan di bank, juga tidak menjamin kelanggengan karena lambat laun uang itu akan terkuras untuk keperluan anak sekolah, anak menikah, membeli rumah untuk anak dan segala macam keperluan.

Oleh karena itu, mesin uang harus tersedia guna menjamin kelangsungan kehidupan setelah memasuki masa purna. Tidak usah bisnis yang besar-besar, cukup **usaha kecil-kecilan** seperti toko sembako, kontrakan rumah, kos-kosan dan bisnis lain yang menghasilkan keuntungan rutin. Dokter Arthur kelahiran Manado ini menambahkan bahwa untuk mempunyai mesin uang seseorang harus bisa berdagang. Sampai saat ini orang-

orang selalu mengatakan saya tidak ada bakat berdagang. Sebenarnya itu hanya alasan saja, atau pembenaran bahwa dia tidak mau berdagang, padahal semua orang itu **pasti bisa berbisnis**, hanya saja malas untuk memulai.

Semua kita bisa berbisnis. Banyak contoh pegawai kantor yang sudah memulai bisnis kecil-kecilan ketika masih aktif bekerja kantoran. Ketika dia pensiun **tidak ada rasa khawatir** karena mesin uangnya selalu produktif. Jadi, menurut Jenderal Polisi Bintang Satu ini, tolong Pak Thamrin tuliskan di media ini, **bahwa berbisnis itu bisa dilakukan oleh semua orang.** Berbisnis bukan bakat. Mulailah dari sekarang jangan tunda lagi. Nanti akan dirasakan bahwa berbisnis dengan kejujuran akan memberikan keberkahan dalam kehidupan. (Awak akan sampaikan pesan komandan ini ke nyonya yang akan memasuki pensiun 4 tahun lagi). Jadi, berutang itu bagaimana. Tak usahlah berutang, itu hanya suatu falsafah kehidupan agar otak kita tetap terus bekerja ketika sudah tidak bertugas lagi di kantoran.

Kalau sudah memiliki usaha sendiri maka bolehlah si pensiunan dimasukkan ke komunitas ATM (Aman, tenang, makan). Selanjutnya kembangkan bisnis itu guna memacu kerja otak sehingga kepikunan dapat diulur atau ditunda. Terakhir yang perlu dihindari dan diwaspadai oleh para pensiunan adalah penyakit 3S (stres, stroke, stop) yang dimulai oleh perasaan bahwa diri sudah tidak berguna (berdaya) lagi. Awak berpamitan kepada junior yang dapat dibanggakan, seorang jenderal yang tetap rendah hati. Banyak ilmu pengetahuan yang awak dapatkan hari ini. Cocoklah kalau Renald Kasali pakar ekonomi mengatakan

bahwa tanda kesuksesan seseorang itu apabila dalam pribadinya melekat sikap FLIP (*focus, listen, involve, personalize*).

Jenderal Tito Memperjuangkan Kenaikan Remunerasi Polri



CNN.com

Tantangan tugas anggota Polri semakin berat dengan maraknya gerakan teroris di Indonesia. Beberapa peristiwa bom tersebut mengarah kepada institusi Polri dengan berbagaim alasan. Oleh karena itu, Polri meningkatkan kewaspadaan di sentra pelayanan publik terutama di markas sendiri. Bom di terminal Kampung Melayu dan di Polda Sumatera Utara merupakan bukti nyata bahwa sasaran tersebut khusus ditujukan ke Polri.

Korban anggota Polri yang sedang betugas berjatuh. Inilah risiko pekerjaan sebagai aparat penegak hukum dan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyerangan tampaknya harus diwaspadai melalui konsentrasi penuh karena pola yang digunakan teroris secara tiba-tiba dan tak terduga sama sekali. Gerakan Polri hendaknya dalam satuan peleton atau paling tidak setingkat regu sehingga antara anggota Polri bisa saling mengamankan keselamatan dalam melaksanakan tugas penuh risiko tersebut.

Terkait dengan hal itu tentu negara dalam hal ini pemerintah berkuasa wajib memperhatikan kesejahteraan anggota Polri. Bukan mengada-ada dalam kehidupan sehari-hari anggota Polri berpangkat Bintara masih bergelut dengan penghasilan yang tidak seimbang dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Belum lagi biaya hidup yang semakin tinggi serta biaya pendidikan putra-putri Bhayangkara jangan sampai terabaikan.

Pemerintah memang telah memberikan penghasilan untuk anggota Polri dalam sistem gaji pokok sesuai golongan pangkat. Di samping itu ada tunjangan uang lauk pauk (ULP), tunjangan jabatan, dan tunjangan keuarga. tampaknya *take home pay* memang belum begitu memadai walaupun sudah ada tambahan penghasilan melalui remunerasi. Terkait dengan remunerasi anggota Polri yang belum 100% seperti kolega di Kementerian Keuangan seperti diberitakan CNN (12/7/2017) Kepala Polisi RI (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengusulkan kenaikan remunerasi bagi anggota Polri kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.

Hal ini dimaksudkan untuk mereformasi internal institusi demi kesejahteraan anggota Polri. Tito mengungkapkan, angka penilaian Polri cukup baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat tahun berturut-turut. Lalu, angka kinerja dan reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi juga sangat baik.

Pada dasarnya ketenangan bekerja bagi sesiapa saja sangat bergantung kepada berasap atau tidaknya dapur di kediaman masing-masing. Seorang kepala keluarga membanting tulang sekuatnya agar dapur keluarga tetap berasap. Ini baru dari sisi pangan, artinya makan tiga kali sehari dengan asupan gizi yang cukup bisa diberikan kepada seisi rumah. Padahal, dalam kehidupan sehari-hari ada lagi kebutuhan mendasar selain pangan, yaitu sandang dan papan. Saya mengisitilahkan kebutuhan dasar itu dengan SPP, yaitu sandang pangan dan papan.

Coba perhatikan apakah semua anggota Polri di seluruh jajaran Polda telah mendapatkan rumah dinas. Papan adalah variabel *dependent* utama untuk menciptakan kenyamanan dalam berteduh. Perumahan dinas wajib diberikan kepada semua anggota Polri agar dia dapat konsentrasi penuh dalam melaksanakan tugas. Ketika mereka masih tinggal di rumah mertua atau mengontrak rumah sempit bagaimana secara psikologis Kapolri bisa menuntut optimalisasi profesionalisme anggota Polri.

Oleh karena itu, adalah suatu kewajaran dalam artian bukan untuk mengistimewakan anggota Polri dibanding aparat sipil negara lainnya, tetapi ada baiknya sisi sisi SPP itu mendapat perhatian negara. Mudah-mudahan rayuan Kapolri kepada Menteri Keuangan dapat dieksekusi dalam waktu secepatnya berupa keputusan menaikkan persentase remunerasi anggota Polri setara dengan pegawai negeri sipil Kementerian Keuangan Republik Indonesia.